

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan pemantauan harga bapokting pada 1 (satu) pasar tradisional di Kabupaten Dompu selama periode Triwulan III tahun 2024 (Juli-September) melalui Siraga (Sistem informasi dan Harga) Kabupaten Dompu. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting selama rentang waktu bulan Juli sampai September tahun 2024 di Kabupaten Dompu dianalisa sebagai berikut:

- a. Harga beras C4 medium, beras C4 premium, beras SPHP, cabai rawit hijau, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, daging ayam, daging sapi, ikan, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau relatif stabil
- b. Harga beras IR medium turun sebesar 6,67% dimana pada minggu pertama Triwulan III berada pada harga Rp.15.000, menurun pada minggu ke III pada harga Rp. 14.000, bertahan sampai minggu terakhir Triwulan III.
- c. Harga cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit hijau mengalami penurunan dimana cabai merah keriting turun 34,78%, cabai merah besar turun 41,45%, cabai rawit merah turun 0,33%.
- d. Harga gula pasir curah dan kemasan mengalami penurunan dimana harga gula pasir curah turun sebesar 5,26% dan gula pasir kemasan 4,76%
- e. Bawang merah turun sebesar 53,61% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 333 kemudian turun pada harga Rp. 15.000 pada minggu terakhir Triwulan III
- f. Bawang putih honan turun sebesar 3% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 000 kemudian turun pada harga Rp. 38.800 pada minggu terakhir Triwulan III
- g. Bawang putih kating naik sebesar 0,33% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 000 kemudian turun pada harga Rp. 40.133 pada minggu terakhir Triwulan III
- h. Bawang bombai turun sebesar 49,63% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 000 kemudian turun pada harga Rp. 40.300 pada minggu terakhir Triwulan III
- i. Telur ayam ras turun sebesar 4,94% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 000 kemudian turun pada harga Rp. 30.420 pada minggu terakhir Triwulan III
- j. Ikan tongkol naik sebesar 6,06% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 000 kemudian naik pada harga Rp. 35.000 pada minggu terakhir Triwulan III
- k. Harga tomat turun sebesar 68,25% dimana pada minggu 1 Triwulan III berada pada harga Rp. 600 kemudian turun pada harga Rp. 4.000 pada minggu terakhir Triwulan III

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Dompu dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode pelaporan Triwulan III (Juli-September) tahun 2024 ini, antara lain:

- a. Pergerakan harga barang pokok TW III relatif stabil sehingga tidak menimbulkan

masalah yang berarti.

- b. Akibat elnino selama musim tanam, kualitas panen dan kuantitas panen tahun 2024 berkurang dibandingkan 2023. Hal tersebut berakibat kurangnya daya beli dan jumlah uang beredar di masyarakat. Tergambar di IPH triwulan III, cenderung negatif sebagai kelanjutan IPH negatif dari Triwulan II.
- c. Meskin IPH negatif, namun permintaan LPG subsidi tetap tinggi. Hal ini disebabkan alokasi tahun 2024 lebih rendah 240 ton dibandingkan tahun 2023. Keterbatasan alokasi tersebut, berakibat terjadinya kericuhan atau gangguan distribusi di masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Secara internal, segera dilakukan koordinasi lintas sektor bersama-sama dengan BULOG untuk mengoptimalkan toko pangan dan SPHP untuk menjual beras medium sesuai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan memantau pelaksanaan HET oleh kios-kios pangan dan SPHP di pasaran.
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan pemetaan untuk potensi lahan penanaman cabai dan tomat;
- c. Kondisi gangguan distribusi LPG Subsidi menyebabkan DPRD melaksanakan RDPU pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan surat undangan Nomor 005/538/170 tanggal 6 Agustus 2024
- d. Untuk mengantisipasi melonjaknya harga cabe dan tomat di musim penghujan, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/179/EKONSDA/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Upaya Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Dompu
- e. Guna mengantisipasi keterbatasan ketersediaan LPG Subsidi di masyarakat sebagai akibat non salur di hari-hari libur, selama Triwulan III, Sekretaris Daerah menerbitkan surat penambahan alokasi untuk bulan Agustus 2024, dengan surat Nomor 500/149.1/EKONSDA/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan Nomor 500/155/EKONSDA/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- f. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Triwulan III 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 31 Juli 2024 di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dengan komoditi beras medium 10.000 Kg, cabe rawit merah 50 Kg, daging ayam ras 50 Kg, tepung terigu 80 Kg, telur ayam ras 950 butir, gula pasir 500 Kg, minyak goreng Bimoli 300 liter, Minyak Kita 700 liter, ikan segar 70 Kg, sayur-sayuran (tomat, kol, selada, dll) 50 Kg.
- g. Melaksanakan Operasi Pasar (OP) pada tanggal 26 Juli 2024 di Lapangan Beringin Kabupaten Dompu dengan komoditas beras 2.000 Kg, gula pasir 440 Kg, telur 1.500 butir.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pemantauan Perkembangan harga pangan pokok dan barang penting, kemungkinan stabilitas harga dan stabilitas pasokan, Kondisi kesiapan distribusi, mulai dari gudang, distributor, dan sub distributor.
- b. Triwulan III, masyarakat Dompu kebanyakan akan memulai persiapan musim tanam. Hal tersebut terlihat dari perilaku konsumsi yang cenderung menurun. Di sisi IPH di triwulan III cenderung negatif, itu berarti daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja.
- c. Pengurangan alokasi LPG subsidi sebanyak 3,68% tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan rumah tangga, pertumbuhan UMKM, dan pertumbuhan

penggunaan di tingkat petani. Kondisi pengurangan alokasi tersebut tidak diantisipasi dengan ketersediaan bahan bakar alternatif atau LPG non subsidi, karena di P. Sumbawa belum tersedia SPBE Non Subsidi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Perlunya program atau kegiatan pendukung yang dapat menjaga ketersediaan pasokan terutama di hortikultural seperti cabe dan tomat, diantaranya dengan merencanakan penanaman dengan memanfaatkan pekarangan masyarakat.
- b. Penambahan alokasi LPG subsidi untuk tahun-tahun berikutnya.
- c. Terdapat keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan niaga BBM Solar (Subsidi dan Non Subsidi). Dibutuhkan kehadiran pemerintah pusat atau provinsi dalam bentuk UPTD yang dapat mengawasi peredaran BBM Non Subsidi dan Subsidi termasuk LPG 3 Kg.
- d. Untuk alokasi BBM Subsidi dan LPG Subsidi untuk Kabupaten Dompu agar memperhitungkan enclave 2 (dua) Kecamatan dari Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Dompu. Dimana faktanya saat ini, pemenuhan kebutuhan LPG 3 Kg dan BBM Bersubsidi di 2 (dua) kecamatan dimaksud, turut mempengaruhi ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM Subsidi yang berada dalam wilayah Kabupaten Dompu.
- e. Perlunya ketersediaan cool storage untuk daging dan ikan juga sayuran. Selain sebagai untuk penyimpanan juga untuk mengantisipasi permintaan disaat produksi terbatas. Pengelola cool storage juga dapat berfungsi sebagai off taker.
- f. Perlunya kerjasama antar kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat agar pasarnya diintegrasikan dalam suatu sistem informasi yang memungkinkan kerjasama antar daerah dengan memperhatikan neraca di masing-masing pasar. Pergerakan distribusi silang dengan memperhatikan kondisi neraca dan ketahanan di masing-masing kabupaten/kota, akan menjaga pasar tetap dengan harga terjangkau dan stabil.